

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah bentuk mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dari satu Provinsi ke wilayah Provinsi lain. Untuk memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja maupun kepada pemberi kerja diperlukan pelayanan antar kerja yang berfungsi untuk mengetahui penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga disatu sisi pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan disisi lain pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil peneliti tersebut peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan Peranan Soerjono Soekonto yang dibagi atas 3 yakni :

- 1) Peran Aktif dari Disnaker pada penempatan tenaga kerja dalam memberikan perlindungan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) sudah berjalan dengan baik namun masih kurangnya masyarakat yang tidak mau mendaftarkan diri pada Disnaker Kab.TTU.
- 2) Peran Partisipatif dapat di lihat dari peran Disnaker dalam perjanjian waktu kerja dengan memberikan paling lama 5 tahun bekerja di daerah lain , setelah pulang ke daerah asal tenaga kerja mampu merintis usaha sendiri (berwirausaha) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

- 3) Peran Pasif dapat di lihat dari peran Disnaker dalam melakukan bimbingan pelatihan guna melatih kemampuan disiplin dan keterampilan para tenaga kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

- 1) Diharapkan di masa yang akan datang Peran Disnaker Kab.TTU dalam penempatan dan perlindungan lebih ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan misalnya penyiksaan oleh majikan kepada tenaga kerja.
- 2) Dalam memfasilitasi para pencari kerja seharusnya Disnakertrans Kab.TTU lebih memperhatikan akan kebutuhan pencari kerja serta memberi pemahaman akan hal-hal yang diperlukan dalam dunia kerja, serta memperluas lagi penyebaran informasi-informasi tentang lapangan pekerjaan kepada pencari kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2003* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007 hlm.6)
- B.Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003, *Manajemen tenaga kerja Indonesia: pendekatan administrasi dan operasional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagong Suyanto, Dwi Narwoko, 2004, *Sosiologi: teks pengantar & terapan*, Jakarta: Kencana.
- Basir Barthos, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Burhan, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke arah Varian Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- DR Payaman Siamanjuntak, 1985, *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Endang Sulistyarningsih dan Yudo Swasono, 1993, *Metode perencanaan tenaga kerja (tenaga kerja nasional, regional dan perusahaan)*, BPPE, Yogyakarta.
- Flippo, 1994, *Manajemen personalia*, Jakarta: Erlangga
- H.Soeharsono Sagir, 2009, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkuprawira, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Jakarta.
- Marihot.P Siahaan, 2005, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong.J.Lexy ,M.A., 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, 1952, *Kamus umum Bahasa Indonesia oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prof.Dr.Hj.Sedarmayanti, M.pd., APU, 1952, *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*, Bandung: Refika Aditama.
- Prof.Dr.Soerjono Soekonto, Budi Sulistyowati, 1942, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Raph Linton, 1936, *Integralisme kebudayaan : Pertautan struktur sosial dengan individuasi manusia*, Bali: Penerbit Jivaloka Mahacipta.

Rohidi Mulyarto,1992,*Analisis data kualitatif:buku sumber tentang metode-metode baru*,Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Soeharsono Sagir,1989,*Kapita selekta ekonomi Indonesia*,Jakarta:Kencana.

Sondang P.Siagian,1995,*Manajemen Sumber Daya Manusia*,PT.Bumi Aksara,Jakarta.

Sugiyono,2002,*Metode penelitian kuantitatif,kualitatif*,Bandung:Alfabeta.

Sugiyono,2015,*Metode penelitian kombinasi(mix methods)*,Bandung:Alfabeta.

Suroto,1992,*Strategi pembangunan dan perencanaan kesempatan kerja*,Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Jurnal :

MY Mael . 2019 . Penempatan Tenaga Kerja Program Antar Kerja Antar Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Poros Politik*. ISSN : 2528-0953.

AA Hariyati. 2019 . Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.Volume 7, Nomor 2.

Akbar Hidayat.2017.Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi*

Website :

<https://idalamat.com/alamat/41187/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kabupaten-timor-tengah-utara> diakses pada tanggal 20-07-2022 pukul 10.20 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi> diakses pada tanggal 04-08-2022 pukul 14.29 WIB

<https://jurnal.unimor.ac.id/JPP/article/download/334/172> diakses pada tanggal 11-09-2019 pukul 13:26

<https://money.kompas.com/read/2022/03/07/161845326/tenaga-kerja-pengertian-jenis-dan-contohnya> diakses pada tanggal 03-10-2022 pukul 21:18

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 203/MEN/1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER 07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, tambahkan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahkan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018 Nomor 05, Nomor Registrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur 08 Peraturan Daerah Tahun 2018, tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 103).